



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun dan menetapkan jadwal kampanye dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil rapat koordinasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pasangan calon yang diwakili Tim Kampanye, Petugas Penghubung pasangan calon, dan pihak-pihak lainnya tentang penyusunan jadwal dan fasilitasi kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari, dimulai 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- KETIGA : Kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, kampanye di media sosial, dan kegiatan lain dalam rangka kampanye dilaksanakan selama 60 hari.
- KEEMPAT : Kampanye melalui media dalam jaringan dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 10 November dan berakhir tanggal 23 November 2024.
- KELIMA : Kampanye melalui metode kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan dalam bentuk Rapat Umum diatur dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang jadwal Kampanye Rapat Umum.
- KEENAM : Tempat pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilarang pada tempat ibadah, tempat Pendidikan, dan tempat yang dilarang lainnya.

- KETUJUH : Jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEENAM, sebagai pedoman bagi:
1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
 2. Pasangan Calon dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



I MADE MERTA ARTA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 85 TAHUN 2024
 TENTANG
 JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

JADWAL DAN PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR
 NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

No	Metode Kampanye	Tanggal																																		
		September						Oktober															November													
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	a. Pertemuan terbatas	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	masa Tenang	masa Tenang	masa Tenang	
	b. Pertemuan tatap muka dan dialog	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	masa Tenang	masa Tenang	masa Tenang
	c. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	masa Tenang	masa Tenang	masa Tenang
	d. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	masa Tenang	masa Tenang	masa Tenang
	e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	masa Tenang	masa Tenang	masa Tenang
2	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	Paslon 1,2,3	masa Tenang	masa Tenang	masa Tenang

